

BAB II

LITERATUR REVIU DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Literatur Reviu

2.1.1 *Stakeholder Theory*

Teori pemangku kepentingan (*Stakeholder Theory*) menjelaskan bahwa suatu organisasi harus mempertimbangkan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas, tidak hanya berfokus pada kepentingan pemegang saham. Freeman dalam Rankin et al. (2023) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai setiap individu maupun kelompok yang mampu memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari organisasi. Dalam perspektif ini, organisasi memiliki kewajiban untuk memperhatikan dampak dari operasional bisnisnya terhadap para pemangku kepentingan, bukan semata-mata untuk memaksimalkan profit bagi pemilik.

Sejalan dengan hal tersebut, Hasnan dalam Rankin et al. (2023) menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan kepentingan dari seluruh pemangku kepentingan, manajer perlu mengelola bisnis secara seimbang agar tercapai kondisi optimal di antara berbagai pihak. Para teoretikus juga berpandangan bahwa organisasi yang mampu memenuhi kepentingan beragam *stakeholder* akan menciptakan nilai yang lebih besar dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, Freeman dalam Rankin et al. (2023) menegaskan bahwa organisasi yang hanya membatasi nilai pada aspek finansial merupakan suatu kekeliruan, karena nilai mencakup segala sesuatu yang dianggap berharga menurut

konsumen, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, laba merupakan hasil yang penting dalam bisnis, namun bukan satu-satunya tujuan organisasi (Rankin et al., 2023). Teori ini menjadi dasar bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan masyarakat melalui aktivitas sosial, salah satunya melalui penyaluran donasi.

Pada penelitian ini, teori *stakeholder* digunakan untuk menjelaskan bahwa keputusan perusahaan dalam menyalurkan donasi tidak hanya dipengaruhi oleh tujuan profit, tetapi juga oleh tekanan dan kepentingan para *stakeholder*. Dewan direksi merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan strategis perusahaan, sedangkan pemerintah sebagai pemegang saham yang memiliki kepentingan terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga keduanya dapat mendorong perusahaan untuk mengalokasikan dana donasi sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab sosial.

2.1.2 Legitimacy Theory

Teori legitimasi (*Legitimacy Theory*) menjelaskan bahwa keberlangsungan suatu organisasi sangat bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap aktivitas yang dilakukannya. Teori ini berlandaskan pada kontrak sosial. Kontrak sosial mencerminkan interaksi antara bisnis dan masyarakat, yang mencakup harapan eksplisit maupun implisit mengenai bagaimana perusahaan seharusnya bertindak agar dapat menjaga keberlangsungan usahanya dalam jangka panjang.

Donaldson dalam Rankin et al. (2023) berpendapat bahwa organisasi yang memperoleh izin untuk melakukan operasi bisnisnya dari masyarakat, pada

akhirnya harus bertanggung jawab kepada masyarakat pula atas cara beroperasi dan aktivitas yang dijalankan. Dengan demikian, organisasi perlu menunjukkan bahwa kegiatan operasionalnya telah selaras dengan harapan masyarakat sebagaimana tercermin dalam kontrak sosial. Suatu organisasi dapat terus bertahan apabila masyarakat mengakui adanya kesesuaian antara nilai-nilai yang diterapkan oleh organisasi dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemegang saham, melainkan juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas sebagai bagian dari upaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi (Rankin et al., 2023).

Pada penelitian ini, teori legitimasi mendasari keputusan perusahaan dalam menyalurkan donasi sebagai upaya untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat. Melalui kegiatan donasi, perusahaan menunjukkan bahwa operasional bisnisnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, melainkan juga selaras dengan nilai dan harapan masyarakat. Dengan demikian, donasi perusahaan dapat dipandang sebagai bentuk nyata dari pemenuhan kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat

Berdasarkan perspektif tersebut, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah umumnya menghadapi ekspektasi publik yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan kepemilikan non-pemerintah, karena dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap kesejahteraan sosial. Tekanan legitimasi yang lebih kuat ini mendorong perusahaan dengan kepemilikan pemerintah untuk melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, termasuk melalui penyaluran

donasi perusahaan sebagai wujud nyata pemenuhan kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat.

2.1.3 Resource Dependence Theory

Resource Dependence Theory (RDT) menjelaskan bahwa organisasi tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga selalu memiliki ketergantungan terhadap lingkungan eksternalnya dalam memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk dapat beroperasi. Teori ini diperkenalkan oleh Pfeffer dan Salancik yang berpandangan bahwa lingkungan eksternal organisasi terdiri dari berbagai pihak dengan kepentingan dan tujuan masing-masing, dan bahwa pihak yang mampu menguasai atau mengontrol sumber daya penting akan memiliki *power* yang lebih besar dalam memengaruhi tindakan organisasi (Febrianti et al., 2024).

Dalam konteks tata kelola perusahaan, Pfeffer dalam Febrianti et al. (2024) menegaskan bahwa dewan direksi merupakan salah satu strategi organisasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap lingkungan eksternal sekaligus menjadi sarana untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan konsep *board capital* yang dijelaskan oleh Taufik (2021), yaitu bahwa dewan direksi berperan sebagai penyedia sumber daya bagi perusahaan yang mencakup keahlian, pengalaman, reputasi, serta kemampuan dalam menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal. Seluruh komponen *board capital* tersebut akan menjadi kekuatan perusahaan yang pada akhirnya menciptakan nilai bagi perusahaan (Taufik, 2021).

Lebih lanjut, implikasi dari *board capital* yang menjadi kekuatan perusahaan memberikan manfaat berupa akses terhadap sumber daya eksternal, saluran komunikasi yang baik kepada para pemangku kepentingan, serta kemampuan untuk memperoleh legitimasi. Dalam aspek tanggung jawab sosial, dewan direksi merupakan mekanisme tata kelola utama yang dapat memengaruhi keputusan dan realisasi aktivitas CSR perusahaan (Taufik, 2021). Selain itu, teori ketergantungan sumber daya juga memiliki keterkaitan erat dengan *Stakeholder Theory*, di mana keduanya mengakui adanya ketergantungan organisasi terhadap kontijensi eksternal maupun internal, serta menempatkan pemangku kepentingan sebagai prioritas dalam pengambilan keputusan organisasi (Febrianti et al., 2024).

Pada penelitian ini, *Resource Dependence Theory* digunakan untuk menjelaskan variabel ukuran dewan direksi. Dewan direksi yang lebih besar mengimplikasikan *board capital* yang lebih beragam dari sisi keahlian, pengalaman, dan jaringan eksternal, sehingga perusahaan memiliki kapasitas yang lebih luas untuk merespons tuntutan sosial dari para pemangku kepentingannya (Taufik, 2021). Dengan demikian, ukuran dewan direksi yang lebih besar diduga mendorong perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih besar pula untuk aktivitas filantropi, termasuk penyaluran donasi, sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya.

2.2 Corporate Social Responsibility

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat (3) terkait perseroan terbatas mendefinisikan tanggung jawab sosial dan lingkungan

sebagai bentuk komitmen yang dilakukan perseroan untuk ikut andil dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik itu bagi perseroan, komunitas lokal maupun masyarakat luas. Berbagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dilakukan oleh perusahaan, salah satunya adalah kegiatan filantropi perusahaan (Burhanuddin et al., 2023).

2.3 Donasi Perusahaan

Bentuk filantropi perusahaan yang paling umum adalah donasi. Donasi dipandang sebagai suatu bentuk pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan, yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan secara menyeluruh (Indriyani & Sudaryati, 2020). Selain itu, aksi donasi juga dapat dimaknai sebagai respons perusahaan atas ekspektasi masyarakat, bahwa kegiatan operasional bisnis yang dijalankan perusahaan adalah hal yang baik, mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, serta turut mendukung kesejahteraan manusia.

Perilaku konsumen saat ini turut dipengaruhi oleh respons sosial yang ditunjukkan perusahaan. Ketika perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya, konsumen dapat merasakan niat baik perusahaan, sehingga mendorong terbentuknya loyalitas terhadap merek serta meningkatkan apresiasi terhadap perusahaan (Wang & Niyomsilp, 2022). Oleh sebab itu, pelaksanaan kegiatan filantropi perusahaan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai tindakan yang bersifat sukarela, melainkan telah menjadi bagian dari kebijakan strategis

perusahaan. Dalam konteks penelitian ini, penyaluran donasi perusahaan diduga dipengaruhi oleh ukuran dewan direksi serta kepemilikan pemerintah sebagai bagian dari mekanisme tata kelola dan struktur kepemilikan perusahaan.

2.4 Ukuran Dewan Direksi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 mendefinisikan dewan direksi sebagai berikut ini:

”Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Dewan direksi merupakan organ perusahaan yang berperan dalam menjalankan aktivitas operasional dan mengelola organisasi guna pemanfaatan sumber daya perusahaan secara optimal dan efektif. Di samping itu, dewan direksi juga bertanggung jawab dalam mengembangkan, melaksanakan dan memelihara hubungan dengan pihak eksternal (Dhevi, 2022).

Hal ini sejalan pula dengan pernyataan pada pasal 4 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012, yang tertulis:

”Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.”

Organisasi dengan jumlah dewan direksi yang lebih besar cenderung akan menciptakan perspektif yang beragam, pengalaman serta keahlian yang lebih luas, pada akhirnya memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih menyeluruh, termasuk strategi CSR (Pratama et al., 2025). Oleh karena itu, ukuran dewan direksi

diduga turut memengaruhi keputusan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial, termasuk dalam menentukan donasi perusahaan.

2.5 Kepemilikan Pemerintah

Suatu kondisi di mana sebagian saham suatu perusahaan dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat dimaknai sebagai kepemilikan pemerintah. Struktur kepemilikan ini mencerminkan keterlibatan negara, sehingga keberadaan pemerintah sebagai pemegang saham mampu memengaruhi pengambilan keputusan manajerial secara signifikan, baik melalui hak kepemilikan saham atau kekuatan politik yang dimiliki (Eryadi et al., 2021). Pernyataan tersebut didukung oleh Salsabilla dalam Oktaviani et al. (2024) yang mengemukakan bahwa perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki pemerintah berpotensi melaksanakan aktivitas operasional bisnisnya sesuai dengan kepentingan pemerintah.

Lebih lanjut, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah cenderung memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi dan berpotensi menjadi pusat perhatian publik, karena secara tidak langsung perusahaan milik pemerintah dipandang sebagai representasi kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong perusahaan dengan kepemilikan pemerintah untuk lebih memperhatikan aspek tanggung jawab sosial sebagai upaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat (Rizky & Yuyetta, 2015), termasuk melalui berbagai aktivitas sosial perusahaan, seperti penyaluran donasi perusahaan.

2.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai indikator yang digunakan untuk mencerminkan tingkat besar atau kecilnya suatu perusahaan (Yovana & Kadir, 2020). Perusahaan berukuran besar memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk terlibat dalam aktivitas filantropi, karena didukung oleh ketersediaan sumber daya yang lebih besar yang dapat dialokasikan untuk kepentingan sosial (Ananzeh et al., 2023).

Oleh karena itu, ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini untuk mengendalikan pengaruh skala perusahaan terhadap donasi yang disalurkan, sehingga hubungan antara ukuran dewan direksi dan kepemilikan pemerintah terhadap donasi perusahaan dapat diestimasi dengan lebih baik.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang secara khusus membahas donasi perusahaan dalam konteks CSR masih relatif terbatas, sehingga sebagian besar studi terdahulu menggunakan pengungkapan CSR sebagai variabel dependen. Padahal, pengungkapan CSR lebih mencerminkan aspek pelaporan, sedangkan donasi perusahaan merupakan bentuk implementasi CSR yang lebih konkret. Oleh karena itu, meskipun penelitian ini lebih menekankan pada sisi implementasi, penelitian terdahulu mengenai pengungkapan CSR tetap relevan dan menjadi salah satu landasan dalam penelitian ini.

Penelitian yang secara langsung mengkaji donasi perusahaan dilakukan oleh Indriyani dan Sudaryati (2020) yang menguji pengaruh keragaman gender dalam

dewan, jenis industri dan ukuran perusahaan terhadap donasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman gender dalam dewan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap donasi CSR, jenis industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap donasi CSR, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap donasi CSR.

Selanjutnya, penelitian oleh Ananzeh et al. (2023) meneliti pengaruh koneksi politik dan kepemilikan keluarga terhadap donasi perusahaan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di *Amman Stock Exchange*. Dengan memasukkan variabel moderasi berupa interaksi antara koneksi politik dan kepemilikan keluarga, serta variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, umur perusahaan, eksposur media, ukuran dewan direksi dan kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap donasi perusahaan, sedangkan kepemilikan keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap donasi perusahaan.

Sementara itu, penelitian lain lebih banyak menggunakan pengungkapan CSR sebagai proksi dalam menilai aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian oleh Rizky dan Yuyetta (2015) menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR, kepemilikan saham eksekutif atau direktur non-independen berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap luas pengungkapan CSR, kepemilikan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR,

profitabilitas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap luas pengungkapan CSR, serta tingkat daya saing industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

Penelitian oleh Ramadhani dan Maresti (2021) menemukan bahwa *leverage* dan ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Sejalan dengan penelitian Nugroho dan Witono (2025) menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *CSR disclosure*. Selain itu, latar belakang pendidikan direksi dan dewan direksi asing berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *CSR disclosure*, sedangkan keberagaman gender direksi dan rata-rata masa jabatan direksi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *CSR disclosure*.

Selain itu, penelitian oleh Oktaviani et al. (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan saham pemerintah dan pengungkapan media berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan saham asing berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pengungkapan CSR sebagai variabel dependen, terdapat landasan teoritis yang mendukung bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan CSR juga berpotensi memengaruhi realisasi donasi perusahaan. Pertama, baik pengungkapan CSR maupun donasi perusahaan sama-sama dapat dipandang sebagai respons perusahaan terhadap tekanan dan ekspektasi

stakeholder. Kedua, donasi yang direalisasikan merupakan bentuk aktivitas sosial perusahaan yang secara logis mendahului pengungkapannya, karena perusahaan tidak dapat mengungkapkan aktivitas CSR yang belum dilaksanakan. Oleh karena itu, variabel-variabel yang terbukti memengaruhi pengungkapan CSR diduga turut memengaruhi keputusan perusahaan dalam merealisasikan donasi.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Indriyani dan Sudaryati (2020)	Y = Donasi <i>Corporate Social Responsibility</i> X1 = Keragaman Gender dalam Dewan X2 = Jenis Industri X3 = Ukuran Perusahaan (Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2018)	1. Keberagaman gender dewan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap donasi CSR. 2. Jenis industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap donasi CSR. 3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap donasi CSR.
Ananzeh et al. (2023)	Y = Donasi Perusahaan X1 = Perusahaan dengan hubungan politik X2 = Perusahaan dengan kepemilikan keluarga Variabel moderasi = Interaksi antara koneksi politik dan kepemilikan keluarga. Variabel kontrol = Ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>financial leverage</i> , umur perusahaan, eksposur media, ukuran dewan direksi dan kualitas audit. (Studi empiris pada perusahaan non-keuangan di Jordania)	1. Koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap donasi perusahaan. 2. Perusahaan dengan kepemilikan keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap donasi perusahaan. 3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap donasi perusahaan. 4. Ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap donasi perusahaan.

	yang pada Amman Stock Exchange)	
Rizky dan Yuyetta (2015)	Y = Luas Pengungkapan CSR X1 = Konsentrasi Kepemilikan X2 = Kepemilikan Saham Eksekutif atau Direktur Non-Independen X3 = Kepemilikan Pemerintah X4 = Ukuran Perusahaan X5 = Profitabilitas Perusahaan X6 = Level Kompetisi Industri (Studi empiris pada perusahaan publik yang tercatat di BEI pada tahun 2011-2013)	1. Konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. 2. Kepemilikan saham eksekutif atau direktur non-independen berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. 3. Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. 4. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. 5. Profitabilitas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. 6. Daya saing industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.
Ramadhani dan Maresti (2021)	Y = Pengungkapan CSR X1 = <i>Leverage</i> X2 = Ukuran Dewan Direksi (Studi empiris pada perusahaan yang termasuk ke dalam LQ45 di BEI pada tahun 2019)	1. <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. 2. Ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.
Oktaviani et al. (2024)	Y = Pengungkapan CSR X1 = Kepemilikan Saham Pemerintah	1. Kepemilikan saham pemerintah berpengaruh positif dan

	X2 = Kepemilikan Saham Asing X3 = Pengungkapan Media (Studi empiris pada perusahaan <i>food and beverage</i> yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021)	signifikan terhadap pengungkapan CSR. 2. Kepemilikan saham asing berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR. 3. Pengungkapan media berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.
Nugroho dan Witono (2025)	$Y = CSR\ Disclosure$ X1 = Keberagaman Gender Direksi X2 = Ukuran Dewan Direksi X3 = Latar Belakang Direksi X4 = Proporsi Direksi Asing X5 = Rata-Rata Masa Jabatan Direksi (Studi empiris pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2023)	1. Keberagaman Gender Direksi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap CSR <i>Disclosure</i>. 2. Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap CSR <i>Disclosure</i>. 3. Latar Belakang Direksi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap CSR <i>Disclosure</i>. 4. Proporsi Direksi Asing berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap CSR <i>Disclosure</i>. 5. Rata-Rata Masa Jabatan Direksi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap CSR <i>Disclosure</i>.

Sumber: Penelitian terdahulu

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Donasi Perusahaan

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam kebijakan penyaluran donasi antarperusahaan. Beberapa perusahaan secara

konsisten menyalurkan donasi dalam jumlah yang relatif besar, sementara perusahaan lainnya cenderung memberikan kontribusi yang lebih kecil. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa keputusan terkait donasi perusahaan tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, salah satunya adalah karakteristik tata kelola perusahaan.

Dewan direksi sebagai organ perusahaan memiliki peran yang penting dalam menentukan arah kebijakan strategis, termasuk dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan *Stakeholder Theory* yang dikemukakan oleh Rankin et al. (2023), perusahaan dituntut untuk memenuhi kepentingan berbagai pemangku kepentingan, sehingga keputusan yang diambil oleh dewan direksi perlu mempertimbangkan aspek sosial, tidak hanya aspek finansial. Dewan direksi dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki keberagaman perspektif dan keahlian yang mampu menghasilkan keputusan yang lebih menyeluruh dan responsif terhadap tuntutan sosial.

Hal ini didukung oleh *Resource Dependence Theory*, yang menjelaskan bahwa dewan direksi merupakan salah satu mekanisme organisasi untuk memperoleh sumber daya dan mengurangi ketergantungan terhadap lingkungan eksternal (Febrianti et al., 2024). Dewan direksi yang lebih besar membawa *board capital* yang lebih beragam, mencakup keahlian, pengalaman, dan jaringan dengan pemangku kepentingan eksternal yang lebih luas (Taufik, 2021). Keluasan *board capital* tersebut memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap tuntutan sosial dan lebih mampu mengalokasikan sumber daya untuk aktivitas filantropi termasuk penyaluran donasi (Taufik, 2021).

Dukungan empiris pun menunjukkan bahwa karakteristik dewan memiliki pengaruh terhadap aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian oleh Ramadhani dan Maresti (2021) serta Nugroho dan Witono (2025) menemukan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 secara eksplisit menegaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan tanggung jawab direksi yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan. Hal ini berarti keputusan donasi secara langsung berada dalam ranah kewenangan dewan direksi, sehingga ukuran dewan direksi yang lebih besar berpotensi menghasilkan alokasi donasi yang lebih besar.

Dengan uraian teoritis, dukungan empiris serta regulasi tersebut, dapat diduga bahwa semakin besar ukuran dewan direksi, maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan dalam menyalurkan donasi sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H_{a1} : Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Donasi Perusahaan

2.8.2 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Donasi Perusahaan

Fenomena yang terjadi juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan karakteristik kepemilikan yang berbeda memiliki kecenderungan yang berbeda pula dalam menyalurkan donasi. Perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah cenderung menyalurkan donasi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Hal ini

mencerminkan adanya perbedaan kebijakan yang dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan.

Berdasarkan *Stakeholder Theory*, pemerintah sebagai pemegang saham memiliki peran yang unik karena tidak hanya bertindak sebagai pemilik perusahaan, tetapi juga mewakili kepentingan publik melalui kebijakan pemerintah. Kondisi ini menjadikan pemerintah sebagai *stakeholder* kunci yang dapat memengaruhi arah pengambilan keputusan perusahaan (Oktaviani et al., 2024). Dalam konteks tersebut, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga diharapkan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik. Salah satu wujud kontribusi tersebut adalah melalui penyaluran donasi perusahaan.

Selain itu dalam perspektif *Legitimacy Theory*, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah berada dalam sorotan publik yang lebih besar karena dianggap merepresentasikan kepentingan negara. Kondisi ini menimbulkan tuntutan bagi perusahaan untuk memastikan bahwa aktivitas operasionalnya selaras dengan nilai dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan terdorong untuk meningkatkan aktivitas sosial, termasuk melalui penyaluran donasi sebagai upaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial.

Temuan penelitian terdahulu juga mendukung hal tersebut. Penelitian oleh Rizky dan Yuyetta (2015) serta Oktaviani et al. (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Selain

itu, Ananzeh et al. (2023) menemukan bahwa faktor yang berkaitan dengan koneksi politik berpengaruh terhadap donasi perusahaan. Meskipun koneksi politik dan kepemilikan pemerintah merupakan dua konsep yang berbeda, keduanya sama-sama mencerminkan adanya keterlibatan atau pengaruh pemerintah dalam perusahaan. Keterlibatan tersebut dapat meningkatkan dorongan perusahaan untuk menunjukkan kepedulian sosial yang lebih besar, termasuk melalui kebijakan donasi perusahaan.

Dengan demikian, semakin besar proporsi kepemilikan saham pemerintah dalam suatu perusahaan, maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk menyalurkan donasi sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H_{a2} : Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif terhadap Donasi Perusahaan